



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MURSINAH
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 1015936

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **375.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m2/162 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/104 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **243.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BISON Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **46.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **175.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **839.000.000**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **839.000.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.